

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah proses yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pembangunan erat kaitannya dengan Infrastruktur yang mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial.

Infrastruktur punya peranan penting sebagai aspek penting dalam pencapaian pembangunan, baik dalam bidang sosial maupun dalam bidang ekonomi. Peranan infrastruktur dapat dikatakan sebagai mediator antara lingkungan sebagai suatu elemen dasar dengan sistem ekonomi dan sosial masyarakat. Selain itu, peranan infrastruktur juga merupakan elemen pendukung kegiatan perkotaan.

Infrastruktur merupakan elemen dasar dari suatu kota, bangunan utama dan suatu kegiatan, bangunan penunjang kegiatan. Infrastruktur merupakan bangunan atau fasilitas fisik yang dikembangkan untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi suatu masyarakat atau komunitas.

Pembangunan daerah adalah upaya yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pelaksanaan pembangunan nasional, maka pengelolaannya harus dilakukan secara terpadu dan searah antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Di dalam pembangunan daerah, tidak akan lepas dari proses evaluasi yang merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur

untuk memperoleh kesimpulan. Dimana evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu itu sendiri.

Pelebagaan penataan ruang mencakup proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang pada hakekatnya berfungsi sebagai suatu mekanisme yang menjamin berlangsungnya penyelenggaraan penataan ruang secara taat asas serta secara iteratif mengintegrasikan rencana tata ruang antar daerah Kabupaten/Kota maupun secara vertikal antara Daerah Propinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota.

Arti penting terselenggaranya pembangunan sektoral yang terintegrasi adalah tercapainya efisiensi dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara kolektif, serta terhindarnya konflik kepentingan antar sektor. Dengan demikian, RTRW Kabupaten Bandung diharapkan dapat berperan sebagai bagian dari proses pelembagaan penataan ruang untuk mencapai konsistensi antara perencanaan dengan implementasinya serta keterpaduan antara perencanaan tata ruang terkait, dan berperan untuk mengidentifikasi prioritas pemanfaatan ruang serta menciptakan keterhubungan antar sektor melalui prasarana dan sarana wilayah berskala kabupaten.

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bandung, terdapat berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Bandung. Diantaranya:

- Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam merumuskan perencanaan
- Masih kurangnya koordinasi antara SKPD pelaksana dengan pemerintahan desa maupun kecamatan dimana lokasi kegiatan pemeliharaan/peningkatan ruas jalan tersebut dilaksanakan.
- Masih ada beberapa kegiatan penanganan ruas jalan maupun jembatan yang seharusnya bukan merupakan kewenangan kabupaten.
- Masih ada penanganan ruas jalan tidak bersamaan dengan perbaikan saluran drainase/kirmir yang mengakibatkan umur rencana jalan tidak terpenuhi sesuai waktu yang ditetapkan.

- Belum adanya kesinambungan dalam perencanaan pembangunan jembatan dan jalan khususnya terkait dengan mekanisme musrenbang sehingga pembangunan jembatan tidak diikuti oleh pembangunan jalan.
- Usulan kegiatan yang berasal dari Musrenbang seringkali tidak memperhatikan kesinambungan (pembangunan setengah-setengah), dan dana yang diusulkan tidak sesuai standar sehingga pembangunan yang dilaksanakan kurang/tidak optimal. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan terkadang mengalami hambatan karena masyarakat menuntut ganti rugi atas tanah/lahannya yang terkena pembangunan.
- Belum konsistennya penerapan dari dokumen perencanaan : jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- Belum optimalnya ketersediaan basis data untuk perencanaan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Salah satu persoalan yang mendasar adalah pelayanan infrastruktur belum dapat dinikmati secara maksimal oleh penduduk Kabupaten Bandung secara merata, sistem transportasi terpadu antar moda belum dikembangkan, sistem jaringan jalan yang ada tidak berbeda dengan kondisi lima tahun yang lalu. Sementara itu pengelolaan lalu lintas yang kurang optimal mengakibatkan timbulnya kemacetan di banyak jalan terutama di jalan-jalan utama. Selain itu, dengan terjadinya musibah di Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS) Leuwigajah dan ditutupnya FPS ini mengakibatkan persoalan dalam pengelolaan sampah.

Terdapat 10 program pembangunan daerah di Kabupaten Bandung, khususnya aspek prasarana umum yang akan di evaluasi diantaranya Jaringan Jalan, Jembatan, Saluran Drainase, Jaringan Irigasi, Terminal, Jaringan Air Bersih, Jaringan Telekomunikasi, Jaringan Listrik dan Energi, Persampahan, dan Sanitasi Lingkungan.

Dari 10 program pembangunan daerah tersebut yang akan di evaluasi hanya aspek dari prasarana umum nya saja. Di tinjau dari 3 dokumen perencanaan pembangunan daerah, yakni Indikasi Program dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung, Program Lima Tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung, dan

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Bandung, Program-program pembangunan daerah tersebut, di evaluasi dengan menggunakan beberapa kriteria, seperti Lokasi, Jenjang Program, dan Fungsi. Serta menggunakan tolak ukur dan skoring, untuk mendapatkan nilai perbandingan dan nilai kesesuaian program pembangunan daerah. Sehingga dari 10 program pembangunan daerah tersebut, dapat menghasilkan mana saja program-program pembangunan yang sesuai dan program-program yang tidak sesuai, dalam aspek prasarana umum dilihat dari ketiga dokumen pembangunan daerah Kabupaten Bandung.

Oleh karena itu, evaluasi program pembangunan daerah ini penting sekali dilaksanakan agar perencanaan dan pembangunan program daerah bisa tepat sasaran, konsisten, terpadu, dan efisien, demi kepentingan publik dan kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Bandung. Serta manfaat dari program pembangunan daerah tersebut bisa langsung dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat.

1.2 Perumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang tersebut diatas, Upaya perbaikan program pembangunan daerah khususnya dari aspek prasarana umum daerah, masih merupakan agenda strategis bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, yang merupakan inti dari kewajiban Daerah, DPRD, dan Kepala Daerah. Secara normatif, perencanaan dan pembangunan harus terpadu, konsisten dan sinkron satu sama lain.

Yang menjadi isu permasalahan diantaranya

- Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan program pembangunan daerah.
- Rujukan pelaksanaan program pembangunan daerah menjadi bermasalah dan tidak fokus.

Sehingga dapat terumuskan pertanyaan penelitian yang menjadi bahan kajian dari penelitian. Pertanyaan penelitian yang dimaksud adalah **“apakah dari ketiga dokumen program pembangunan daerah yakni LKPJ, RTRW, dan**

RPJMD khususnya dalam prasarana umum di Kabupaten Bandung memiliki kesesuaian?”.

1.3 Tujuan Dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Studi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian program pembangunan daerah khususnya prasarana umum di Kabupaten Bandung dengan mengevaluasi kesesuaian program pembangunan daerah dari 3 dokumen perencanaan pembangunan daerah, yakni Indikasi Program dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung, Program Lima Tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung, dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Bandung,

1.3.2 Sasaran

Adapun sasaran dari penelitian ini untuk mencapai tujuan yaitu :

1. Mengidentifikasi 3 Dokumen program pembangunan terhadap 3 kriteria yakni Lokasi, jenjang program dan fungsi.
2. Mengidentifikasi 10 program prasarana umum di 3 Dokumen program pembangunan terhadap 3 kriteria yakni Lokasi, jenjang program dan fungsi.
3. Mengidentifikasi skala ukur dari 10 program prasarana umum terhadap 3 kriteria yakni Lokasi, jenjang program dan fungsi.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Secara geografis wilayah Kabupaten Bandung terletak pada $6^{\circ} 41' - 7^{\circ} 19'$ Lintang Selatan dan diantara $107^{\circ} 22' - 108^{\circ} 5'$ Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Bandung mempunyai luas 176.238,67 Ha, meliputi 31 Kecamatan. Dengan jumlah penduduk sebesar 3.172.860 jiwa Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada **Tabel I.1** dibawah ini

Tabel I.1
Jumlah Kecamatan Dan Luas Wilayah

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
1	Soreang	2.550,68
2	Kutawaringin	4.730,26
3	Katapang	1.572,46
4	Rancabali	14.837
5	Pasirjambu	23.957,64
6	Ciwidey	4.846,92
7	Baleendah	4.155,54
8	Dayeuhkolot	1.102,91
9	Bojongsoang	2.781,22
10	Banjaran	4.291,79
11	Pangalengan	19.540,93
12	Cangkuang	2.461,06
13	Cimaung	5.500,02
14	Arjasari	6.497,79
15	Pameungpeuk	1.462,32
16	Majalaya	2.536,46
17	Ciparay	4.617,57
18	Pacet	9.193,96
19	Kertasari	15.207,36
20	Paseh	5.102,90
21	Ibun	5.456,51
22	Solokan Jeruk	2.400,66
23	Cicalengka	3.599,23
24	Nagreg	4.930,29
25	Cikancung	4.013,63
26	Cileunyi	3.157,51
27	Rancaekek	4.524,83
28	Cimencyan	5.308,33
29	Cilengkrang	3.011,94
30	Margaasih	1.834,49
31	Margahayu	1.054,33
Jumlah		176.238,67

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung 2007-2027

Secara administratif Kabupaten Bandung mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi.

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Secara substansi, yang menjadi kajian dalam studi ini dibatasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan program pembangunan daerah, khususnya prasarana umum dalam

- Indikasi program dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung tahun 2008-2010,
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bandung, mengenai program lima tahunan tahun dan
- Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Bandung mengenai laporan dari sektor-sektor yang berkaitan dengan prasarana umum tahun 2008-2010, serta kesesuaian ketiga dokumen tersebut di dalam implementasinya.

1.5 Metodologi Penelitian

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran dari studi ini maka dilakukan beberapa metodologi penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, metode pengumpulan data, dan metode analisis

1.5.1 Metode Pendekatan Studi

Dalam penelitian ini, metoda pendekatan studi yang digunakan meliputi pendekatan terhadap beberapa tahap yang terkait dengan perencanaan, yaitu pengumpulan data, pengolahan data awal, analisis/identifikasi serta penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan, mempelajari bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, perizinan, peraturan perundang-undangan, serta artikel dari internet.

Sedangkan untuk melakukan tahapan selanjutnya diperoleh pengetahuan dari mata kuliah yang telah didapat pada perkuliahan, serta mempelajari studi-studi terdahulu. Program-program pembangunan daerah khususnya prasarana umum, di evaluasi dengan menggunakan beberapa pendekatan seperti menggunakan pendekatan kriteria, seperti Lokasi, Jenjang Program, dan Fungsi. Serta menggunakan tolak ukur dan skoring.

Dan tahap selanjutnya yaitu tahap penilaian kesesuaian program dari ketiga dokumen perencanaan pembangunan daerah, setelah hasilnya muncul dari masing-masing jenis program, lalu di cari indeks kesesuaiannya dengan yang terdiri dari 4 kelas.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, Adapun dalam kajian kali ini, yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah dengan survei sekunder saja, yaitu dengan mencari data dan informasi dari instansi-instansi yang berhubungan dengan kajian.

1.5.3 Metode Analisis

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam studi ini tipe analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan metoda yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggunakan nilai matematis atau statistik.

Dalam studi evaluasi kesesuaian program pembangunan daerah di Kabupaten Bandung ini, metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis angka indeks. Angka Indeks merupakan ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel/ sekumpulan variabel yang berhubungan satu sama lain pada waktu atau tempat yang sama atau berlainan. Gambaran angka indeks yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai dengan nilai tunggal dari variabel sama, dengan kata lain sebagai 2 nilai yang berpasangan (*binary comparison*).

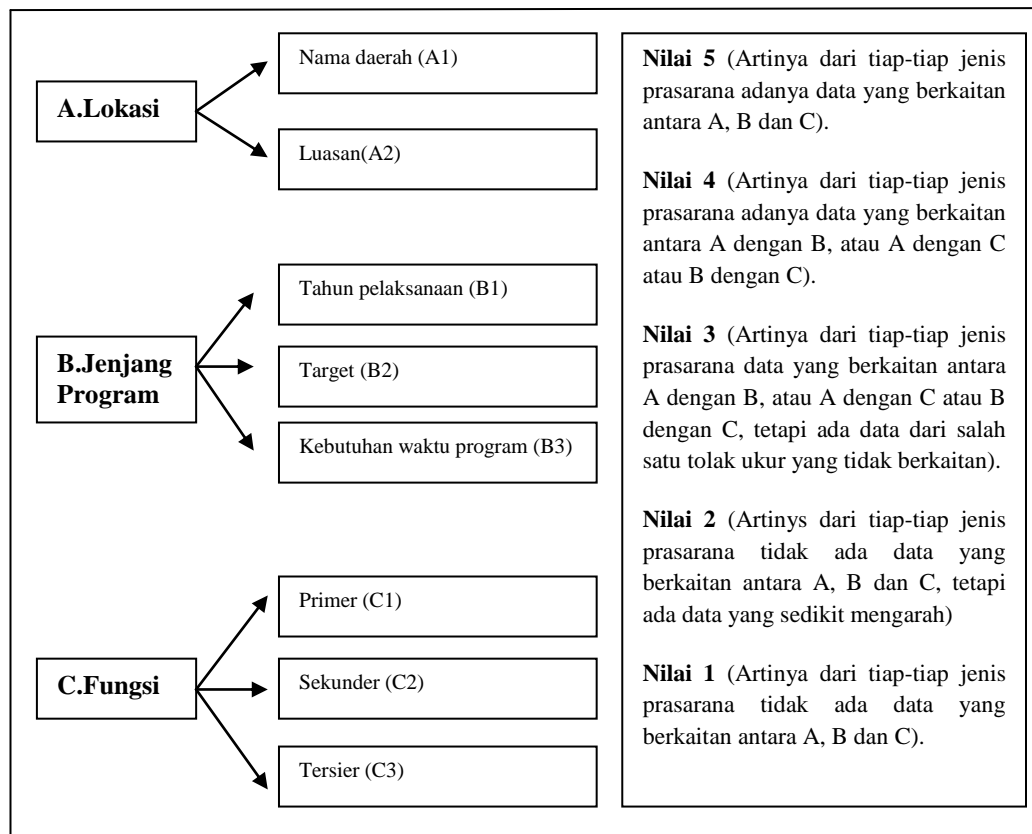
Angka indeks merupakan ukuran statistika yang biasa digunakan untuk membandingkan suatu nilai lain dari variabel yang sama, nilai lain tersebut dapat berwujud nilai tunggal maupun kumpulan nilai-nilai yang berurutan. Perbandingan itu sebenarnya bersatuan persen, tetapi didalam praktek satuan % jarang atau hampir tidak pernah disertakan. Dan nilai variabel yang dibandingkan biasanya adalah nilai-nilai yang berbeda waktu.

Tabel I.2
Skala Banding Secara Berpasangan

Tingkat Kepentingan	Definisi	Penjelasan
1	Kedua elemen sama penting	Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap tujuan
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lain	Pengalaman dan penilaian sedikit mendukung satu elemen dibanding elemen yang lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting daripada elemen yang lain	Pengalaman dan penilaian sangat kuat mendukung satu elemen dibanding elemen yang lainnya
7	Satu elemen jelas lebih penting dari elemen lainnya	Satu elemen dengan kuat didukung dan dominan terlihat dalam praktek
9	Satu elemen mutlak lebih penting daripada elemen yang lainnya	Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan
2,4,6,8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan	Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi diantara dua pilihan
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i	

Sumber: Saaty, 1993

Gambar 1.2
Skema Penilaian



1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan sebuah studi, harus dibuat terlebih dahulu kerangka berpikir dari penelitian yang akan dilakukan. Dimana 10 jenis program pembangunan daerah pembangunan dari ketiga dokumen perencanaan pembangunan daerah, di evaluasi menurut beberapa kriteria, seperti Lokasi, Jenjang Program, dan Fungsi.

Serta menggunakan tolak ukur dan skoring, untuk mendapatkan nilai perbandingan dan nilai kesesuaian program pembangunan daerah. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada **Gambar 1.2** di bawah ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam studi ini terdiri atas lima bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup wilayah dan materi studi, metode pendekatan dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai teori-teori yang relevan dengan studi yang dikaji, yang berasal dari *text book*, jurnal, studi-studi terdahulu dan lainnya.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum wilayah studi yaitu Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.

BAB IV EVALUASI KESESUAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM DI KABUPATEN BANDUNG

Bab ini menjelaskan mengenai evaluasi kesesuaian dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Bandung , Indikasi Program dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung, dan Program Lima Tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bandung.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisikan kesimpulan dari studi yang telah dilakukan serta rekomendasi.